

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Manajemen Laba

Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.¹ Dengan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dengan manajer sering memicu terjadinya permasalahan manajemen laba. Akhir-akhir ini manajemen laba merupakan sebuah fenomena umum yang sering terjadi di beberapa perusahaan. Dalam prakteknya dilakukan untuk mempengaruhi angka laba dapat terjadi secara legal ataupun ilegal. Manajemen perusahaan berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya dengan menyajikan informasi laba yang sebaik mungkin dengan alasan akan diperolehnya kompensasi keuangan. Tindakan ini disebut dengan manajemen laba (*earning management*). Manajemen melakukan manajemen laba dengan tujuan menarik perhatian para pemegang saham akan prestasi kinerja perusahaan yang baik. Ketertarikan investor pada perusahaan tersebut berpengaruh pada harga saham perusahaan dan akhirnya berpengaruh pada nilai perusahaan.²

Mendefinisikan manajemen laba sebagai “*some ability to increase or decrease reported net income at will*”. Ini berarti manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimalkan atau meminimumkan laba termasuk perataan laba, sesuai dengan keinginan manajer.³ membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai pelaku *oportunistik* manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan *politicals costs* (*Oppurtunistic Earnings Management*). Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting* (*Efficient Earnings Management*), di mana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan

¹ Sulistyanto, Sri, *Manajemen Laba Teori Dan Model Empiris* (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 12.

² Nanik Lestari and Selvy Agita Ningrum, “Pengaruh Manajemen Laba Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi,” *Journal of Applied Accounting and Taxation* 3, no. 1 (2018): 99–109.

³ Sri, *Manajemen Laba Teori Dan Model Empiris*, h.13.

perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.⁴

a) Teknik dan Pola Manajemen Laba

Teknik manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu :

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgement* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain lain.
2. Mengubah metode akuntansi. Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh : merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
3. Menggeser periode biaya atau pendapatan. Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain : mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.⁵

Ada 7 pola manajemen laba yang dikemukakan yaitu :

1. *Taking a Bath*

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba dimasa datang.

2. *Income Minimization*

Pola ini dilakukan pada saat perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat di atasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

3. *Income Maximization*

⁴ Scoot, William, *Financial Accounting Theory, Second Edition* (Canada: Prentice Hall, 2000), h. 24.

⁵ Lilis Setiawati and Ainun Na'im, "Rekayasa Saat LABA," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 15, no. 4 (2000): 424-441.

Pola ini dilakukan pada saat laba perusahaan menurun, yang bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. *Income Maximization* dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

4. *Income Smoothing*

Pola ini dilakukan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil.

5. *Offsetting extraordinary / unusual gains*

Pola ini dilakukan dengan menindahkan efek-efek laba yang tidak biasa atau temporal yang berlawanan dengan *trend* laba.

6. *Aggressive accounting applications*

Pola yang diartikan sebagai salah saji (*misstatement*) dan dipakai untuk membagi laba antar periode.

7. *Timing Revenue dan Expense Recognition*

Pola ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan *timing* suatu transaksi. Misalnya pengakuan prematur atas pendapatan.⁶

b) **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba**

Kecurangan dalam pelaporan keuangan biasanya terjadi karena kondisi yang ada dalam lingkungan internal, buruknya perilaku etis dari manajemen dan likuiditas atau profitabilitas perusahaan. Teori penghubung *Good corporate governace* terhadap manajemen laba yaitu salah satu upaya mewujudkan *Good corporate governace* adalah upaya untuk mengeliminirkan manajemen laba dalam pengelolaan sebuah perusahaan, yaitu: Aturan dan standar akuntansi, transparansi yang masih lemah, sistem pengawasan dan pengendalian perusahaan yang belum optimal, kepentingan untuk pengelolaan perusahaan yang cenderung mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan pribadi dan kelompok.⁷

Manajemen laba yang dilakukan oleh manajer didorong oleh beberapa motivasi. Faktor faktor yang mendorong tindakan manajer dalam melakukan

⁶ William, *Financial Accounting Theory, Second Edition*, h. 26.

⁷ Sri, *Manajemen Laba Teori Dan Model Empiris*, h. 16.

kegiatan manajemen laba adalah :

1. *Bonus Scheme* (Rencana Bonus)

Laba perusahaan sering dijadikan indikator penilaian prestasi manajer perusahaan. Dengan demikian para manajer yang bekerja dalam perusahaan yang menerapkan *Bonus Scheme* akan berusaha mengatur laba yang dilaporkannya dengan tujuan memaksimalkan jumlah bonus yang akan diterima.

2. *Debt Covenant* (*Kontrak Utang Jangka Panjang*)

Ketika perusahaan semakin mendekati waktu pelanggaran perjanjian utang, para manajer cenderung memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba periode mendatang ke periode berjalan dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran kontrak utang.

3. *Political Motivation* (*Motivasi Politik*)

Manajer pada perusahaan-perusahaan skala besar dan industri strategis cenderung untuk menurunkan laba terutama pada saat periode kemakmuran yang tinggi, dengan harapan memperoleh kemudahan serta fasilitas dari pemerintah.

4. *Taxation Motivations* (*Motivasi perpajakan*)

Para manajer mengurangi laba yang dilaporkan dengan tujuan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

5. *Pergantian CEO* (*Chief Executive Officer*)

Biasanya CEO yang masa jabatannya akan segera berakhir memaksimalkan jumlah laba guna meningkatkan jumlah bonus yang akan diterima. Demikian halnya para manajer dengan kinerja yang buruk, mereka cenderung untuk menaikkan jumlah laba yang dilaporkan untuk menghindarkan diri dari pemecatan.

6. *Initial Public Offering* (*Penawaran Saham Perdana*)

Informasi keuangan perusahaan yang menjual sahamnya kepada publik merupakan sumber informasi penting karena dapat dimanfaatkan sebagai sinyal kepada investor potensial. Oleh karena itu manajer akan berusaha menaikkan jumlah laba yang dilaporkan untuk mempengaruhi keputusan yang di buat investor.⁸

⁸ Ibid, William, *Financial Accounting Theory, Second Edition*, h. 34.

c) Pengukuran Manajemen Laba

Model pengukuran manajemen laba pada penelitian ini adalah :

Model Modifikasi Jones

Dechow mempertimbangkan versi modifikasi *Model Jones* dalam analisis empiris. Modifikasi ini dirancang untuk menghilangkan kemungkinan dugaan *Model Jones* untuk mengukur akrual diskresioner dengan kesalahan ketika diskresi manajemen dilakukan terhadap pendapatan. Dalam model yang dimodifikasi, akrual nondiskretioner diperkirakan selama periode peristiwa (yaitu, selama periode di mana manajemen laba dihipotesakan. Penyesuaian yang dilakukan terhadap *Model Jones* asli adalah bahwa perubahan pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang pada periode kejadian. Formula selengkapnya dari *Model John* yang dimodifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Menghitung total accrual (TAC) yaitu laba bersih tahun t dikurangi arus kas operasi tahun t dengan rumus sebagai berikut :

$$TAC = NI_{it} - CFO_{it}$$

Selanjutnya, total accrual (TA) diestimasi dengan *Ordinary Least Square* sebagai berikut:

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

- 2) Dengan koefisien regresi seperti pada rumus di atas, maka *non discretionary accruals* (NDA) ditentukan dengan formula sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

- 3) Terakhir, *discretionary accruals* (DA) sebagai ukuran manajemen laba ditentukan dengan formula berikut :

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Keterangan :

DA_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan i dalam periode tahun t

NDA_{it} = *Nondiscretionary Accruals* perusahaan i dalam periode tahun t

TA_{it} = Total *acruals* perusahaan i dalam periode tahun t

NI_{it} = Laba bersih perusahaan i dalam periode tahun t

CFO_{it} = arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i dalam periode tahun t

A_{it-1} = total *asset* perusahaan i dalam periode tahun t-1

ΔRev_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi dengan pendapatan perusahaan I pada tahun t-1

PPE_{it} = properti, pabrik, dan peralatan perusahaan i dalam periode tahun t

ΔRec_{it} = piutang usaha perusahaan I pada tahun t dikurangi Pendapatan perusahaan I pada tahun t-1.

2. *Good Corporate Governance*

a) *Teori Agensi (Agency Theory)*

Hubungan keagenan (*agency relationship*) terjadi ketika satu atau lebih individu yang disebut sebagai *principal* membayar atau memanfaatkan individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai *agen*, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada *agen* tersebut. Hubungan keagenan utama terjadi antara pemegang saham (*principal*) dengan manajer (*agent*).⁹ Pemisahan antara *agen* dan pemilik yang memungkinkan terabaikannya kepentingan pemilik¹⁰. Teori agensi merupakan teori yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (*principles*) dalam menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional (*agent*) yang lebih mengerti dan memahami cara untuk menjalankan suatu usaha.¹¹ Timbulnya masalah hubungan antara *agent* dan *principal* (*agency problems*) terjadi ketika manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, Menurut *Hill and Jones (1992)*, dalam hubungannya dengan keagenan, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu biaya pengawasan (*monitoring cost*), biaya kontrak (*contracting cost*) dan validitas politis.

⁹ Brigham.E, Houston.J, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Edisi Kesepuluh* (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 26.

¹⁰ Robinson Richard B.Jr Pearcel II, John A, *Manajemen Startegis* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 47.

¹¹ Moeljono Djokosantoso, *Good Corporate Culture Sebagai Inti Governance* (Jakarta: PT Elex Gramedia Kompusindo, 2005), h. 27.

Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah cenderung akan melaporkan laba bersih rendah atau dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen (salah satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di masyarakat). Kemudian sebagai wujud pertanggungjawaban, manajer sebagai agen akan berusaha memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal, dalam hal ini adalah pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan.¹² Para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*). Jadi, teori ini timbul pada saat keinginan dan tujuan dari principal dan agent berlawanan, dan melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agent adalah hal yang sulit bagi principal. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

b) Pengertian *Good Corporate Governance*

Istilah *Good Corporate Governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern* yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority* atau memerintah dengan kewenangan. *Good Governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat di pertanggung jawabkan secara bersama. *Corporate Governance* mengacu pada sistem, prinsip-prinsip dan proses di mana sebuah perusahaan diatur. *Corporate Governance* menyediakan pedoman bagaimana mengendalikan dan mengarahkan perusahaan sehingga dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang dapat menambah nilai perusahaan dan dapat bermanfaat untuk seluruh *stakeholder* dalam jangka panjang. *Stakeholder* dalam

¹² Ni Nyoman Yintayani, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2009" (2011).

hal ini, termasuk semua pihak dari dewan direksi, manajemen, pemegang saham, karyawan dan masyarakat.¹³

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan GCG sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. *Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.¹⁴

c) Manfaat *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance dapat memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif, sehingga dapat tercipta mekanisme *checks and balance* di perusahaan. Menurut *Forum Corporate Governance di Indonesia (FCGI)* ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan *Good Corporate Governance* yang baik, antara lain :

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanamkan modal di Indonesia
- 4) Pemegang saham akan merasa puas meningkatkan *shareholders, value dan Dividen*.

¹³ Agung Ridangga Puri and Gayatri Gayatri, "Good Corporate Governance Memoderasi Pengaruh Financial Distress Terhadap Manajemen Laba," *E-Jurnal Akuntansi* 2018, no. 1 (2018): 489–512.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.

d) Asas *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006) terdapat 5 asas *Good Corporate Governance* yaitu :

- 1) *Transparansi (Transparency)*, Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah di akses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
- 2) *Akuntabilitas (Accountability)*, Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
- 3) *Responsibilitas (Responsibility)*, Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
- 4) *Independensi (Independency)*, Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- 5) *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*, Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

e) Unsur-Unsur *Corporate Governance*

Unsur-unsur *Corporate Governance* berasal dari dalam perusahaan (yang selalu diperlukan dalam perusahaan) serta unsur-unsur yang ada diluar perusahaan (yang selalu diperlukan diluar perusahaan) yang bisa menjamin berfungsinya *Good Corporate Governance*. Unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, dinamakan *Corporate Governance-Internal* Perusahaan. Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah:

- 1) Pemegang saham;
- 2) Direksi;
- 3) Dewan komisaris;
- 4) Manajer;
- 5) Karyawan/serikat pekerja;
- 6) Sistem remunasi berdasar kinerja;
- 7) Komite audit.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi:

- 1) Keterbukaan dan kerahasiaan (*disclosure*)
- 2) *Transparansi*;
- 3) *Accountability*;
- 4) *Fairness*;
- 5) Aturan dari *code of conduct*.

Unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan diluar perusahaan, dinamakan *Corporate Governance*-Eksternal Perusahaan. Unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah:

- 1) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum;
- 2) Investor;
- 3) Institusi penyedia informasi;
- 4) Akuntan publik;
- 5) Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan;
- 6) Pemberi pinjaman;
- 7) Lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi:

- 1) Aturan dari *code of conduct*;
- 2) *Fairness*;
- 3) *Accountability*;
- 4) Jaminan hukum.

Perilaku partisipasi pelaku *corporate governance* yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur tersebut (eksternal dan internal) menentukan kualitas *Corporate Governance*.

f) Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme komposisi *Good Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Porposi Dewan Komisaris Independen dan komite audit.

1) Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Pengaruh dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu, dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja direksi yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Indikator yang digunakan untuk mengatur komisaris independen adalah persentase jumlah komisaris independen dari jumlah anggota dewan komisaris yang ada. Komisaris independen diprosikan dengan menggunakan proporsi jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris yang ada di perusahaan. Berdasarkan OJK Republik Indonesia dalam hal komisaris terdiri lebih dari dua orang anggota komisaris independen wajib paling kurang 30% dari seluruh anggota komisaris.¹⁵

Berdasarkan Keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-643 /BL/2012 yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang memenuhi persyaratan :

- a) Berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik;
- b) Bukan merupakan orang yang bekerja pada Emiten dan Perusahaan Publik dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- c) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;

¹⁵ Muhahammad Thamrin, Bahtiar, *Penerapan Konsep Good Corporate Governance Dalam Industri Manufaktur Di Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2019), h. 75.

- d) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik;
- e) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- f) Tidak mempunyai hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komisaris independen dapat memberikan pengawasan terhadap perusahaan secara objektif, menjamin pengelolaan yang bersih dan sehatnya operasi perusahaan dalam mendukung kinerja perusahaan. Maka semakin tinggi independensi dan *efektivitas corporate board* dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Oleh karenanya peneliti dalam penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan *Good Corporate Governance* yang diproporsikan dengan dewan komisaris independen, diformulasikan sebagai berikut :

Proporsi Dewan Komisaris Independen:

$$= \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

2) Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Berdasarkan Kep. BAPEPAM Nomor: KEP 643/BL/2012, tugas dan tanggung jawab komite audit diantaranya adalah:

- a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan;
- b) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
- c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

- d) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- e) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi;
- f) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, dan manajemen risiko Emiten dan Perusahaan Publik;
- g) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan; dan
- h) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Keberadaan komite Audit pada saat ini telah diterima sebagai suatu bagian dari tata kelola organisasi perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), adapun yang membentuk Komite Audit adalah Komite Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengelolaan perusahaan. Komite audit di Indonesia masih merupakan hal yang relatif baru karena perkembangan Komite Audit di Indonesia sangat terlambat dibandingkan dengan negara lain. Komite audit yang efektif diperlukan dalam pencapaian *Good Corporate Governance*. Ada beberapa manfaat dari pembentukan komite audit dalam perusahaan. Pertama, komite audit melakukan pengawasan laporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal. Kedua, komite audit melakukan pengawasan independen terhadap pengelolaan perusahaan. Ketiga, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan yang baik dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi manajemen laba.¹⁶

g) Perspektif *Good Corporate Governance* Dalam Pandangan Islam

Good Corporate Governance merupakan istilah baru dalam bidang keilmuan dan bidang keagamaan maupun termasuk dalam ajaran islam. Serangkaian isi, tujuan, serta nilai yang terkait dengan *Good Corporate Governance* (*GCG*) telah dibicarakan dalam alquran dan al-hadis. Meskipun *Good Corporate Governance* merupakan istilah baru, namun konsepnya terdapat di dalam alquran surah Al-Baqarah 282:283 sebagaimana berikut:

¹⁶ Herianto, "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Diponegoro Journal of Accounting* 2, no. 3 (2018): 1–11.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُومُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ
مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ
اللَّهُ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمٌ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

[Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (282).

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (283)].¹⁷

Di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 3, di dalam firman Allah “Dan hendaknya seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. Maksudnya dengan adil dan benar serta tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisannya tersebut dan tidak boleh juga ia menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau menguranginya. Makna dari isi ayat tersebut yaitu mengenai proses transaksi secara bertahap. Ayat ini menerangkan arti pentingnya menjaga catatan secara tepat sehingga tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil.

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Agama Republik Indonesia (Q.S Al-baqarah: 282-283).

Abu Sa'id, as-Syabil, Rabi'nin Anas, al-Hasan, Ibnu Juraij, Ibnu Zaid, dan ulama lainnya mengatakan, Sebelumnya hal itu merupakan suatu kewajiban, kemudian dinask (dihapuskan) dengan firman-NYA (QS. Albaqarah: 283) : “Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).”¹⁸

Dari ayat di atas pelajaran yang dapat kita ambil yaitu dibutuhkan transparancy dan disclosure dalam kegiatan bisnis. Kedua hal itu merupakan prinsip-prinsip pokok dalam *Good Corporate Governance*. Di dalam al-quran tindakan lebih penting dari pada sekedar kata-kata, oleh karenanya *Good Corporate Governanace* harus diwujudkan melalui perbuatan dan tindakan yang nyata.

Dari sini, peringatan tentang perlunya takwa serta mengingat pengajaran Ilahi menjadi sangat tepat. Penutup Ayat ini merupakan dasar dari Akuntansi syariah, sangat dianjurkan untuk transaksi yang tidak secara tunai baik yang memiliki nilai besar, ataupun kecil hendaknya dicatat dalam sebuah pembukuan, menjadi saksi hukumnya fardhu kifayah, dan janganlah enggan menjadi saksi dengan alasan kemaslahatan pribadi, disisi lain hendaknya yang melakukan muamalah tidak memberi mudharat kepada saksi dan pencatat transaksi, perintah bertakwa diakhir ayat dimaksudkan agar yang melakukan transaksi perdagangan tidak menggunakan pengetahuannya untuk menarik keuntungan yang berakibat kerugian dipihak lain.¹⁹

3. Nilai Perusahaan

Tujuan perusahaan didirikan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan atau adanya pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan yang mudah terlihat adalah adanya penilaian yang tinggi dari eksternal perusahaan terhadap asset perusahaan maupun terhadap pertumbuhan pasar saham. Nilai perusahaan merupakan harga yang sedia dibayar seandainya perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan dapat tercermin melalui harga saham. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi tingkat pengembalian kepada investor dan itu berarti

¹⁸ Iwan Wahyuddin Safrillah, “Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Baqarah Ayat 282, h. 3.

¹⁹ Hendra Harmain, Mhd Syahman Sitompul, Nurlaila, “Implimentasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur,” *Human Falah* Volume 3, no. 2 (2016): h. 209.

semakin tinggi juga nilai perusahaan terkait dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri, yaitu untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham.²⁰

Nilai perusahaan juga didefinisikan sebagai nilai pasar. Nilai pasar merupakan persepsi pasar yang berasal dari investor, kreditur, dan stakeholder lain terhadap kondisi perusahaan yang tercermin pada nilai pasar saham perusahaan yang bisa menjadi ukuran nilai perusahaan.²¹ Tujuan manajemen perusahaan adalah memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham.²² Nilai Perusahaan adalah nilai sekarang (*present value*) dari *free cash flow* di masa mendatang pada tingkat diskonto sesuai rata-rata tertimbang biaya modal. *Free cash flow* adalah *cash flow* yang tersedia bagi investor (kreditur dan pemilik) setelah memperhitungkan seluruh pengeluaran untuk operasional perusahaan dan pengeluaran untuk investasi serta aset lancar bersih.²³

a) Jenis-Jenis Nilai Perusahaan

Terdapat lima jenis nilai perusahaan berdasarkan metode perhitungan yang digunakan, diantaranya:

1) Nilai Nominal

Nilai nominal merupakan nilai tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan yang disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif.

2) Nilai Pasar

Nilai pasar sering disebut juga kurs, harga yang terjadi dari proses tawar menawar dipasar saham. Nilai ini pun hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual dipasar saham.

3) Nilai Intrinsik

²⁰ Dwi Sukirni, "Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen Dan Kebijakan Hutang Analisis Terhadap Nilai Perusahaan," *Accounting Analysis Journal* 1, no. 2 (2012).

²¹ Achmad Nurcholik and Augustina Kurniasih, "Pengaruh Keputusan Investasi, Kebijakan Dividen, Keputusan Pendanaan, Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Sektor Consumer Goods Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)," *Jurnal Pendidikan & Budaya WARTA PENDIDIKAN* (2021): 18–30.

²² Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Blanced* (Jakarta: Bumi Angkasa Raya, 2017), h.59.

²³ Debbie Christine, "Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Property and Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)," *Forum Keuangan dan Bisnis V* (2016): 70–76.

Nilai intrinsik merupakan konsep paling abstrak, karena mengacu kepada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik bukan sekedar harga dari sekumpulan asset yaitu melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.

4) Nilai Buku

Nilai buku merupakan nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antar total aset dan total utang dengan jumlah saham beredar. Nilai buku suatu aset dalam periode tertentu yang dapat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain.

5) Nilai Likuidasi

Nilai likuidasi merupakan nilai jual seluruh aset dalam perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi yang dapat dihitung dengan cara sama dengan menghitung nilai buku yaitu neraca performa yang disiapkan ketika perusahaan akan di likuidasi.²⁴

Dari beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan, pada penelitian ini peneliti menggunakan nilai pasar. Nilai perusahaan *go public* selain menunjukkan nilai seluruh aktiva, juga tercermin dari nilai pasar atau harga sahamnya, sehingga semakin tinggi harga saham mencerminkan tingginya nilai perusahaan.²⁵

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan dalam menentukan nilai perusahaan adalah menggunakan *Price to Book Value* (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan.²⁶ Makin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. PBV juga

²⁴ R DHINATA, "Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Bursa Efek Indonesia) (2020): 1–22.

²⁵ E. Rolón et al., "Metrics for the Evaluation of Models Business Process," *Actas IDEAS 2006 - 9th Workshop Iberoamericano de Ingenieria de Requisitos y Ambientes de Software* 1, no. 1998 (2006): 1–9.

²⁶ Ibid.

dapat berarti rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan *overvalued* (di atas) atau *undervalued* (di bawah) nilai buku saham tersebut.

$$PBV = \frac{\text{Harga pasar per lembar saham}}{\text{Nilai buku saham}}$$

Price Book Value di atas merupakan salah satu variabel yang dipertimbangkan seorang investor dalam menentukan saham mana yang akan dibeli. Nilai perusahaan dapat memberikan keuntungan pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kekayaan pemegang saham.

B. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini telah diteliti oleh beberapa peneliti, antara lain:

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Weldy Maulana (2019)	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel <i>Moderating</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek	Variabel Independen (x) = <i>Good Corporate Governance</i> yang terdiri dari ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan. Variabel Dependen (y) = manajemen laba variabel moderasi = Nilai perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial Dari hasil pengujian tersebut, diperoleh bukti empiris bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. menunjukkan koefisien regresi Dari hasil pengujian tersebut, diperoleh bukti empiris bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen yaitu GCG yang terdiri dari

		Indonesia)		<p>Komposisi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit dan Ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Manajemen Laba.</p> <p>pengujian <i>moderating</i> dengan uji residual menunjukkan bahwa variabel Nilai Perusahaan bukan merupakan variabel <i>moderating</i>, yaitu tidak mampu memoderasi hubungan variabel <i>Good Corporate Governance</i> yang terdiri dari Komposisi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan dengan Manajemen Laba.</p>
2	<p>Maria Dwi Putri Jemunu, Gaguk Apriyanto, dan Parawiyati (2020)</p>	<p><i>Good corporate governance</i>, Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> dan Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan</p>	<p>Variabel Independen(x)= <i>Good Corporate Governance</i>, Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> dan Manajemen Laba.</p> <p>Variabel dependen (Y)= Nilai Perusahaan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan uji asumsi klasik bahwa:</p> <p>a) penelitian ini bebas dari masalah normalitas</p> <p>b) variabel-variabel dalam penelitian ini tidak berhubungan satu sama lain, atau dengan kata lain data penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas</p> <p>c) tidak terdapat gejala autokorelasi dalam penelitian ini.</p> <p>d) tidak terdapat masalah heterokedastisitas dalam</p>

				<p>penelitian in</p> <p>Hasil analisis dan pengujian hipotesis Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> dan Dewan Komisaris Independent tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.</p>
3	Selvy Yulita Abdillah, R. Anastasia Endang Susilawati , Nanang Purwanto (2018)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Pada Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014)	Variabel Independen (x)= <i>Good Corporate Governance</i> Variabel dependen (Y)= Manajemen Laba	Hasil penelitian ini menunjukkan analisis regresi setelah dilakukan pengujian asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif , komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.
4	Citra Agis Fitriana (2020)	Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2018)	Variabel Independen (x)= manajemen laba Variabel Dependen (Y)= Nilai Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen Laba Riil berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan dan Manajemen Laba Akrual berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

5	Melati Sihombing (2019)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017	Variabel Independen (x)= <i>Good Corporate Governance</i> . Variabel dependen (Y)= Manajemen Laba	<p>Penelitian ini menunjukkan yang menyatakan secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</p> <p>Dari hasil regresi F-hitung, variabel independen (Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite audit dan Kepemilikan Manajerial) berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen Manajemen Laba.</p>
6	Reny Dyah Retno M. (2018)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010)	Variabel Independen (x)= <i>Good Corporate Governance</i> Dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel dependen (Y)= Nilai Perusahaan	<p>Hasil penelitian menunjukkan GCG berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol Size dan Leverage pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010</p> <p>Pengungkapan CSR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol <i>Size</i>, Jenis industri, <i>Profitabilitas</i>, dan <i>Leverage</i> pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010 GCG dan Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap</p>

				Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010.
7	Hastuti Widyarningsih (2019)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap manajemen laba	Variabel Independen (x1)= Kepemilikan Institusional Variabel Independen (x2) = Kepemilikan Manajerial Variabel Independen (x3)= Kepemilikan asing Variabel Independen (x4)= Komisaris Independen. Dependensi Y = Manajemen Laba	Dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan Manajerial dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap manajemen laba.
8	Raudhatul Husni (2021)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Profitabilitas</i> Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang terdaftar di BEI)	Variabel Independen X1 = Kepemilikan Institusional Variabel Independen X2 = <i>Leverage</i> Variabel dependen Y = Manajemen Laba	Kepemilikan institusional dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap manajemen laba.
9	Sesti Yurfita Sari (2020)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	X1 = Kepemilikan Manajerial X2 = Kepemilikan	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan institusional dan Ukuran Perusahaan

		Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Institusional X3 = Ukuran Perusahaan Y = Manajemen Laba	berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.
10	Astari (2021)	Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.	Variabel Dependen (X): Manajemen Laba Variabel Independen (Y): Kepemilikan Institusional	Berdasarkan hasil parsial variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

Dari beberapa penelitian di atas, Weldy Maulana meneliti mengenai Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel *Moderating* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial Dari hasil pengujian tersebut, diperoleh bukti empiris bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. menunjukkan koefisien regresi Dari hasil pengujian tersebut, diperoleh bukti empiris bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen yaitu GCG yang terdiri dari komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, komite audit dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba.²⁷

Hal ini berbeda dengan pendapat Melati Sihombing dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. Penelitian ini menunjukkan yang menyatakan secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dewan komisaris

²⁷ Maulana, "Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)."

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dari hasil regresi F-hitung, variabel independen (Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, komite audit, dan Kepemilikan Manajerial) berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen Manajemen Laba.²⁸

Penelitian di atas juga bisa kita lihat bahwa keduanya memiliki persamaan, yang mana Komite audit berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap manajemen laba.

Perbedaan antara penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya terletak pada komposisi variabel *Good Corporate Governance* yang diteliti, penelitian ini menggunakan 2 komposisi variabel GCG yaitu Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan komposisi variabel *Good Corporate Governance* yaitu ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan. Hal lain membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu alat untuk mengukur nilai perusahaan. Untuk mengukur nilai perusahaan, penelitian ini menggunakan analisis PBV (*Price Book Value*). Sedangkan penelitian sebelumnya untuk mengukur nilai perusahaan menggunakan analisis Tobin's Q. Kemudian yang membedakan teknik pengambilan sampelnya pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teknik *Proportional random sampling*.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka konseptual untuk menjelaskan mengenai pengaruh antara variabel independen (bebas) *Good Corporate Governance*, yang terdiri dari mekanisme komposisi proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap variabel dependen (terikat) yang berupa Manajemen laba serta nilai

²⁸ Melati Sihombing, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017" (Pembangunan Panca Budi, 2019).

perusahaan sebagai variabel *moderating* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.

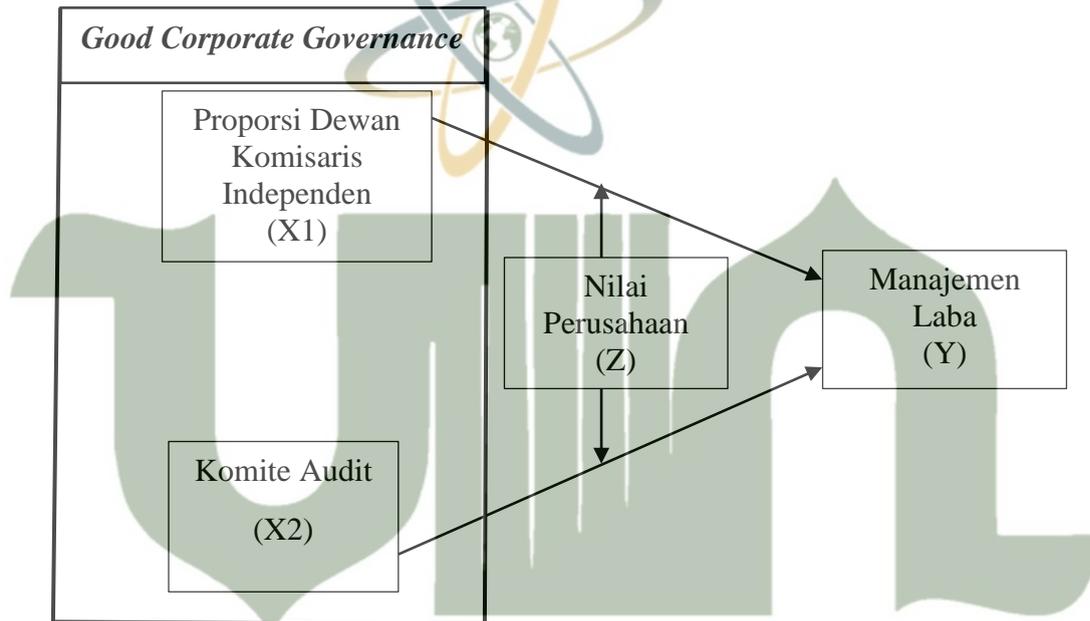
Penerapan dan pengelolaan *Corporate Governance* yang baik disebut sebagai GCG yang merupakan sebuah sistem dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholdernya. Sehingga tata kelola yang baik dapat memperkuat hubungan profitabilitas dan nilai perusahaan begitu pula sebaliknya. Pengaruh dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu, dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja direksi yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Komite audit dipilih oleh dewan komisaris untuk mengawasi sistem pengendalian akuntansi perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif mampu membuat kinerja perusahaan berjalan lebih baik. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Ada beberapa manfaat dari pembentukan komite audit dalam perusahaan. Pertama, komite audit melakukan pengawasan laporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal. Kedua, komite audit melakukan pengawasan independen terhadap pengelolaan perusahaan ketiga, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan yang baik dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi manajemen laba. Komite audit yang efektif diperlukan dalam pencapaian *Good Corporate Governance*.²⁹

Jadi dapat disimpulkan sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan diharapkan dapat meningkatkan hasil (laba) dari aktivitas operasi perusahaan sehingga informasi laba dapat membantu pemilik atau pihak lain dalam lama menaksir kekuatan laba perusahaan dan manajer yang kinerjanya di ukur dengan berdasarkan informasi laba sehingga mendorong timbulnya penyimpangan dalam bentuk manajemen laba. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang

²⁹ Herianto, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia."

memiliki aspek kewajaran, transparansi, pertanggungjawaban, dan akuntabilitas dianggap dapat menjadi suatu jalan untuk mengurangi tindakan manajemen laba, dan juga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Serta Nilai Perusahaan. Kerangka Konseptual sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban atau dugaan sementara dari suatu permasalahan yang dihadapi, yang masih mengandung kemungkinan benar atau salah atau yang kebenarannya masih perlu untuk dibuktikan lebih lanjut.

H₁ : Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

H₂ : Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

H₃ : *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit berpengaruh secara simultan terhadap Manajemen Laba.

H₄ : Nilai Perusahaan mampu memoderasi hubungan antara *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dengan Manajemen Laba.